

Implementasi E-Government Penggunaan Aplikasi E-Buddy dalam Pengelolaan Surat Masuk di Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Kurnia Candra Dewi

Dosen Pembimbing:

Ilmi Usrotin Choiriyah, M.AP

Program Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Februari, 2026

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi administrasi pemerintahan menuju sistem digital. Pemerintah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Dasar hukum pelaksanaan SPBE: Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi Nasional E-Government Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE

Tabel 1 Perkembangan Indeks SPBE Nasional Tahun 2023-2024

No.	Tahun	Indeks SPBE Nasional	Kategori
1.	2023	2,79	Baik
2.	2024	3,12	Baik

Sumber: Kementerian PANRB (2024)

Berdasarkan tabel tersebut, Indeks SPBE Nasional mengalami peningkatan dari 2,79 pada tahun 2023 menjadi 3,12 pada tahun 2024. Meskipun kedua capaian tersebut berada dalam kategori “Baik”, peningkatan sebesar 0,33 poin menunjukkan adanya perbaikan yang cukup signifikan dalam tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pendahuluan

IMPLEMENTASI E-BUDDY DI DESA KEPER

Kabupaten Sidoarjo mengembangkan aplikasi E-Buddy sebagai bagian dari digitalisasi administrasi pemerintahan. Lokasi penelitian: Desa Keper E-Buddy digunakan untuk: Pengelolaan surat masuk secara elektronik. Disposisi digital kepada pimpinan Pengarsipan otomatis berbasis system. Permasalahan yang ditemukan: Kemampuan SDM belum sepenuhnya optimal Jaringan internet tidak stabil Masih terdapat pencatatan manual sebagai cadangan Sinkronisasi arsip digital belum maksimal

RESEARCH GAP DAN TUJUAN PENELITIAN

Penelitian terdahulu membahas implementasi E-Buddy dari aspek: Landasan hukum Daur hidup arsip elektronik. Konsistensi penggunaan system Penelitian ini berfokus pada: Implementasi E-Government dalam pengelolaan surat masuk Analisis menggunakan teori E-Government Indrajit dengan enam infrastruktur pendukung. Tujuan penelitian: Menganalisis implementasi E-Buddy dalam pengelolaan surat masuk Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis implementasi aplikasi E-Buddy dalam pengelolaan surat masuk di Desa Keper. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi E-Government menggunakan teori Indrajit yang mencakup enam indikator, yaitu infrastruktur data, legal, institusional, manusia, teknologi, serta strategi dan kepemimpinan. Sumber data terdiri atas data primer melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder dari dokumen dan literatur. Informan ditentukan secara purposive sampling, yaitu Sekretaris Desa dan Kaur TU dan Umum. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

A. Infrastruktur Data

Pengelolaan data dalam aplikasi E-Buddy di Desa Keper mencakup surat masuk, surat keluar, dan disposisi sebagai inti administrasi desa. Alur surat berjalan sistematis, dimulai dari input oleh operator, verifikasi Sekretaris Desa, hingga disposisi Kepala Desa. Seluruh proses terekam dalam sistem sehingga memudahkan pemantauan dan mencegah kehilangan dokumen. Penyimpanan dilakukan secara digital melalui aplikasi serta backup manual dalam folder komputer sebagai langkah antisipatif. Data tahun 2021–2024 menunjukkan tren peningkatan jumlah surat yang dikelola, sekaligus mulai tercatatnya surat keluar secara digital. Hal ini menunjukkan optimalisasi pemanfaatan sistem serta peningkatan akuntabilitas dan tertib administrasi berbasis digital.

Tabel 2 Pengelolaan Surat Pada Akun E-Buddy Desa Keper

No.	Tahun	Surat Masuk	Surat Keluar	Disposisi
1.	2021	87	-	87
2.	2022	265	-	265
3.	2023	268	53	268
4.	2024	284	73	284

Pemerintah Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo (2024)

Hasil dan Pembahasan

B. Infrastruktur Legal

Implementasi E-Buddy memiliki dasar hukum yang kuat mulai dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, PermenPAN-RB Nomor 6 Tahun 2011, hingga Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 sebagai dasar operasional di tingkat kabupaten. Desa belum memiliki SOP internal khusus, namun pelaksanaan tetap mengacu pada regulasi kabupaten sehingga tercipta keseragaman standar antar desa. Pemahaman perangkat desa terhadap regulasi diperoleh melalui sosialisasi dan bimbingan teknis. Dengan demikian, aspek legal telah menjadi fondasi yang menjamin keabsahan, akuntabilitas, dan perlindungan administratif dalam penggunaan aplikasi.

Regulasi	Isi Pokok	Lingkup	Keterangan di Desa Keper
Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003	Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government	Nasional	Jadi dasar awal pengembangan e-Gov di seluruh instansi pemerintah
Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018	Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Nasional	Menjadi kerangka umum penerapan SPBE, termasuk di daerah
“PermenPAN-RB No. 6 Tahun 2011”	Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik	Nasional	Mengatur tata kelola naskah dinas elektronik pada instansi pemerintah
“Peraturan Bupati Sidoarjo No. 46 Tahun 2018”	Tata Kelola TIK Menuju Smart City	Kabupaten	Menjadi payung hukum penerapan aplikasi berbasis digital di Sidoarjo
“Peraturan Bupati Sidoarjo No. 30 Tahun 2020”	Tata Naskah Dinas Elektronik	Kabupaten	Menjadi dasar hukum penggunaan aplikasi E-Buddy di lingkungan Pemkab & Desa
“SOP Internal Desa”	-	Desa	Tidak tersedia, desa hanya mengikuti arahan Kabupaten

Hasil dan Pembahasan

C. Infrastruktur Institusional

Secara kelembagaan, implementasi E-Buddy melibatkan seluruh perangkat desa dengan pembagian peran yang jelas. Operator, yaitu Kaur TU dan Umum, memiliki akses utama terhadap input surat dan disposisi, sementara Sekretaris Desa melakukan verifikasi dan Kepala Desa menentukan tindak lanjut. Struktur organisasi menunjukkan pembagian tugas yang terkoordinasi sehingga alur administrasi berjalan tertib dan berjenjang. Pembatasan akses dilakukan untuk menjaga keamanan data serta mencegah kesalahan input. Koordinasi dilakukan baik melalui sistem maupun komunikasi langsung, sehingga keseimbangan antara teknologi dan mekanisme kerja manual tetap terjaga. Hal ini memperkuat efektivitas tata kelola administrasi desa.

No.	Nama	Jabatan	Tugas Utama
1.	Suharto	Kepala Desa	Pimpinan desa, pengambilan keputusan disposisi
2.	Ardi Perdana Sukma	Sekretaris Desa	Koordinasi administrasi, verifikasi surat
3.	Nikmatul Maula	Kaur TU dan Umum	Operator E-Buddy: input surat masuk/keluar, disposisi
4.	Suci Isnaini	Kasi Pelayanan	Administrasi umum dan tata usaha
5.	Amirul Vardiansyah	Staf Pelayanan Desa	Membantu kasi pelayanan dalam input data dan administrasi surat
6.	Imam Sugiantoro	Kasi Kesejahteraan	Bidang kesejahteraan sosial
7.	Zaenal Arifin	Kaur Keuangan	Pengelolaan keuangan desa
8.	Sutrisno	Kaur Perencanaan	Perencanaan pembangunan desa
9.	Sukandar	Kepala Dusun	Koordinasi wilayah Dusun Keper
10.	Suyadi	Kepala Dusun	Koordinasi wilayah Dusun Bogem

Hasil dan Pembahasan

D. Infrastruktur Manusia

Perangkat desa telah memperoleh pelatihan awal pada tahun 2020 serta sosialisasi lanjutan pada tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pelatihan tersebut meningkatkan pemahaman teknis sekaligus kesiapan operasional aplikasi. Secara umum, kemampuan perangkat desa dalam mengoperasikan E-Buddy tergolong memadai, dengan kendala utama hanya pada stabilitas jaringan internet. Respon perangkat desa menunjukkan penerimaan positif karena aplikasi dinilai mempercepat proses administrasi dan mencegah kehilangan arsip. Namun, pengelolaan masih terpusat pada satu operator sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan apabila operator tidak hadir. Oleh karena itu, diperlukan operator cadangan untuk menjaga kesinambungan pelayanan.

Hasil dan Pembahasan

E. Infrastruktur Teknologi

Dari sisi sarana prasarana, desa memiliki tiga unit komputer, tiga laptop, empat printer, serta jaringan Wi-Fi 50 Mbps yang mendukung operasional aplikasi. Secara umum, kondisi perangkat dalam keadaan baik dan mampu menunjang pekerjaan administrasi. Kendala yang muncul berupa gangguan jaringan internet atau server maintenance dari kabupaten, namun bersifat sementara dan telah diinformasikan secara resmi kepada desa. Perangkat desa menyesuaikan pekerjaan dengan menunggu pemulihan sistem atau menggunakan alternatif jaringan. Dengan ketersediaan sarana yang memadai dan komunikasi yang baik dari kabupaten, infrastruktur teknologi dinilai cukup mendukung efektivitas implementasi E-Buddy.

Jenis Sarana / Prasarana	Jumlah	Kondisi
Komputer (Asus)	3	Baik
Printer (Epson L310, Brother DCP-L25400W, HP Smart Tank 615)	4	Baik
Jaringan Wi-Fi (Indihome)	1 titik (50 mbps)	Cukup Stabil
Laptop (Lenovo 81WH)	3	Baik

Hasil dan Pembahasan

F. Strategi Pemikiran dan Kepemimpinan

Kepala Desa memandang digitalisasi melalui E-Buddy sebagai kebutuhan dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan publik. Strategi yang diterapkan meliputi penggunaan sistem digital disertai backup manual untuk menjaga keamanan data, serta evaluasi rutin melalui diskusi internal perangkat desa. Desa belum melakukan pengembangan sistem secara mandiri dan masih menunggu arahan dari kabupaten, namun menunjukkan sikap terbuka terhadap inovasi lanjutan. Kepemimpinan yang adaptif dan partisipatif ini menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan implementasi E-Buddy di tingkat desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi aplikasi E-Buddy dalam pengelolaan surat masuk di Desa Keper menunjukkan bahwa pada indikator infrastruktur data, sistem telah mampu mengelola surat masuk, surat keluar, dan disposisi secara terdokumentasi serta didukung arsip cadangan sebagai langkah antisipatif. Pada infrastruktur legal, penerapan aplikasi memiliki landasan hukum yang jelas melalui regulasi nasional dan Peraturan Bupati Sidoarjo, meskipun desa belum memiliki SOP internal tersendiri dan masih mengacu pada kebijakan kabupaten. Dari sisi infrastruktur institusional, struktur organisasi dan pembagian tugas telah berjalan terkoordinasi dengan operator sebagai pengelola utama dan pimpinan desa sebagai pengambil keputusan disposisi. Pada infrastruktur manusia, perangkat desa telah memperoleh pelatihan dan mampu mengoperasikan aplikasi, namun masih terdapat ketergantungan pada satu operator sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan ketika yang bersangkutan tidak hadir. Sementara itu, infrastruktur teknologi tergolong memadai dengan dukungan komputer, laptop, printer, dan jaringan internet, walaupun sesekali terjadi gangguan jaringan atau server dari kabupaten. Terakhir, pada indikator strategi pemikiran dan kepemimpinan, kepala desa menunjukkan komitmen terhadap digitalisasi administrasi dengan menerapkan evaluasi rutin dan sistem cadangan manual sebagai bentuk kehati-hatian, sehingga secara keseluruhan implementasi E-Buddy di Desa Keper telah berjalan baik meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek pembagian SDM dan pengembangan kebijakan internal.

